

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA**

(Skripsi)

Oleh:

DINDA CHAIRUNNISSA ABDULLAH

2111021089



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA

Oleh

DINDA CHAIRUNNISSA ABDULLAH

Pembangunan ekonomi inklusif menjadi perhatian penting dalam upaya mewujudkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, belanja pemerintah fungsi kesehatan, belanja pemerintah fungsi ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM) yang terpilih sebagai model terbaik berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, sementara belanja pemerintah fungsi kesehatan dan belanja pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses terhadap peluang ekonomi, dan penurunan pengangguran merupakan kunci utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Sumatera.

Kata Kunci: Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pembangunan Ekonomi Inklusif

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING AND OPEN UNEMPLOYMENT RATES ON INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN SUMATRA ISLAND

By

DINDA CHAIRUNNISSA ABDULLAH

Inclusive economic development is an important concern in efforts to achieve growth that is not only high, but also equitable and fair. This study aims to analyze the impact of government spending on education, health, and economic functions, as well as the Open Unemployment Rate (TPT), on the inclusive economic development of provinces in Sumatra during the period 2018–2023. The method used is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) selected as the best model based on the Chow test and the Hausman test. The results of the study indicate that government spending on education and the open unemployment rate have a significant negative impact on the inclusive economic development, while government spending on health and government spending on the economy have a significant positive impact on the inclusive economic development. Simultaneously, all independent variables significantly influence the inclusive economic development. These findings suggest that improving human capital quality, expanding access to economic opportunities, and reducing unemployment are key factors in promoting more inclusive economic development in Sumatra.

Keywords: Government Spending on Education Function, Government Spending on Health Function, Government Spending on Economy Function, Open Unemployment Rate, Inclusive Economic Development

**ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA**

Oleh

DINDA CHAIRUNNISSA ABDULLAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENGARUH BELANJA
PEMERINTAH DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
DI PULAU SUMATERA**

Nama

: **Dinda Chairunnissa Abdullah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2111021089**

Jurusan

: **Ekonomi Pembangunan**

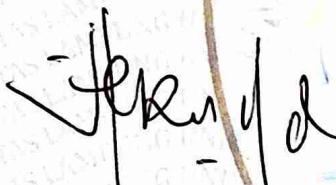
Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II



Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

NIP. 197702122006041001



Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc.

NIP. 199402182022032006

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



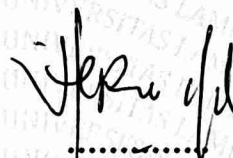
Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M.

NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.



Penguji I : Prayudha Ananta, S.E., M.Si.



Penguji II : Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nurbani, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 September 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Chairunnissa Abdullah

NPM : 2111021089

Konsentrasi : Ekonomi Publik Dan Fiskal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Sumatera” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Dinda Chairunnissa Abdullah

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dinda Chairunnissa Abdullah, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 7 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Herlin Imelda.

Penulis memulai Pendidikan di TK Al-Barqah pada tahun 2006 dan selesai di tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN Lenteng Agung 04 Petang dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 242 Jakarta dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 62 Jakarta dan tamat pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri. Penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) FEB Unila pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 dipercaya sebagai Sekretaris Bidang 3 HIMEPA FEB Unila. Penulis juga menjadi anggota UKM-F PILAR FEB Unila pada tahun 2023. Selain kegiatan organisasi, penulis juga mengikuti Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di SEAMEO QITEP In Language pada periode Februari – Juni 2024.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2024 di Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari.

MOTTO

Fa Inna Ma'al Usri Yusroo

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah:5)

All big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single, tiny decision. But as that decision is repeated, a habit sprouts and grows stronger.

“Semua hal besar bermula dari hal-hal kecil. Benih dari setiap kebiasaan adalah keputusan kecil yang sederhana. Namun, ketika keputusan itu diulangi, kebiasaan itu tumbuh dan semakin kuat.”

(James Clear – *Atomic Habits*)

Begin with the end in mind

“Mulailah dengan membayangkan tujuan akhir”

(Stephen R. Covey – *The 7 Habits of Highly Effective People*)

“Jangan menyerah, terus melangkah, dan tetap semangat untuk menghadapi hari esok”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Abdullah dan Ibu Herlin Imelda, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan tanpa henti telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah perjuangan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan, atas segala ilmu, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan selama masa studi. Tak lupa, apresiasi tulus penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan, khususnya sahabat-sahabat tercinta, atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan. Terakhir, persembahan ini penulis tujukan kepada diri sendiri yang telah berusaha bertahan, belajar, dan terus melangkah meski jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna dan bermanfaat.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Pulau Sumatera”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Studi Ekonomi Pembangunan.
3. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. dan Ibu Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing serta Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si. dan Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan secara konsisten dan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdullah dan Ibu Herlin Imelda, atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang selalu mendukung dan memberikan yang terbaik untuk anaknya.
7. Adik tercinta, Muhammad Fadlan dan Rahma Aulia yang telah menjadi sumber semangat untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta, Muhammad Aldimas Zain, Ria Nitami, Cahyaning Andayani, Linggar Tri Ananda, dan Anisa Mardhotila, serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu Dion, Januar, Nisa, Rebekka, dan Nadia yang selalu hadir dengan dukungan moral, kebersamaan, semangat, serta candaan yang menguatkan selama menjalani perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
9. Dan terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan dalam setiap tantangan, melewati keraguan, dan tetap memilih untuk bangkit meski perjalanan tidak selalu mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

Bandar Lampung, September 2025

Dinda Chairunnissa Abdullah
2111021089

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian.....	19
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif	20
2.1.3 Pertumbuhan Inklusif.....	24
2.1.4 Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	26
2.1.5 Belanja Negara.....	36
2.1.6 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi	37
2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka	46
2.1.8 Hubungan Antar Variabel.....	49
2.2 Penelitian Terdahulu	51
2.3 Kerangka Berpikir	55
2.4 Hipotesis	56
III. METODE PENELITIAN	58
3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian	58
3.1.1 Jenis Penelitian	58
3.1.2 Ruang Lingkup Penelitian	58
3.2 Data dan Sumber Data.....	58
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	59

3.3.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	59
3.3.2 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan	60
3.3.3 Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan	60
3.3.4 Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi	60
3.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	61
3.4 Model dan Metode Analisis Data	61
3.4.1 Model Penelitian.....	61
3.4.2 Metode Analisis Data.....	62
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	69
4.2 Uji Pemilihan Model	70
4.2.1 Uji Chow.....	70
4.2.2 Uji Hausman	70
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	70
4.3.1 Uji Normalitas.....	70
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	71
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	72
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	72
4.4 Hasil Persamaan Regresi Data Panel pada Model terpilih FEM.....	73
4.5 Uji Hipotesis Statistik.....	74
4.5.1 Uji t Statistik	74
4.5.2 Uji F Statistik.....	76
4.5.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	77
4.6 Pembahasan Penelitian	77
4.6.1 Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera	77
4.6.2 Pengaruh Belanja Pemerintah fungsi Kesehatan Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera	80
4.6.3 Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera	82
4.6.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera	84
4.7 <i>Individual Effect</i> Hasil Regresi Data Panel 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2023	86
V. KESIMPULAN DAN SARAN	89

5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	4
Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Tahun 2018–2023 Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera	13
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data	59
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	69
Tabel 4. 2 Uji Multikolinearitas	71
Tabel 4. 3 Uji Heteroskedastisitas	72
Tabel 4. 4 Uji Autokorelasi	72
Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	73
Tabel 4. 6 Uji t Statistik	75
Tabel 4. 7 Uji F Statistik	77
Tabel 4. 8 Persentase Rata-Rata Belanja Pendidikan Perkategori Tahun 2018-2023	78
Tabel 4. 9 Nilai <i>Individual Effect</i> 10 Provinsi di Pulau Sumatera	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rata-Rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023	7
Gambar 1. 2 Rata-Rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023	9
Gambar 1. 3 Rata-Rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023	11
Gambar 2. 1 Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	26
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	55
Gambar 4. 1 Uji Normalitas Jarque-Bera.....	71

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian kini tak lagi hanya diukur melalui tingginya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari sejauh mana hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Ali & Zhuang, 2007). Sejalan dengan pandangan tersebut, Arkum & Amar (2022) menyatakan bahwa pembangunan di suatu negara dikatakan berhasil apabila disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan peningkatan output dan pendapatan nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan, karena manfaatnya bisa terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

Dalam penelitiannya, Ali & Zhuang (2007) juga menekankan bahwa salah satu permasalahan paling mendesak di negara berkembang Asia saat ini adalah meningkatnya ketimpangan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum terbagi secara adil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi pendekatan strategis baru dalam pembangunan, karena pertumbuhan yang tinggi saja tidak menjamin tercapainya keadilan sosial maupun keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menurut Ianchovichina & Lundstrom (2009), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan besarnya ekonomi, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam investasi dan memperoleh pekerjaan yang layak serta produktif. Inklusivitas sendiri merupakan konsep yang mencakup keadilan, kesetaraan kesempatan, serta perlindungan terhadap masyarakat ketika menghadapi perubahan di pasar dan dunia kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan yang baik tidak hanya tercermin dari peningkatan angka ekonomi, melainkan juga berdasarkan

sejauh mana masyarakat luas dapat ikut serta dan merasakan manfaat dari proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi jangka panjang, perubahan struktural, serta perbaikan kualitas hidup. Namun, hasil pembangunan tidak selalu tersebar merata. Sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, konsep pembangunan ekonomi inklusif hadir sebagai pendalaman dari pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengurangan kesenjangan, serta pemerataan pembangunan. Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pembangunan yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antardiswilayah. Untuk mendukung pengukuran keberhasilan pembangunan yang lebih komprehensif, pemerintah melalui Bappenas mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

IPEI merupakan alat ukur alternatif yang tidak sebatas mengukur laju pertumbuhan ekonomi, namun turut memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan serta perluasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, sehingga mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi yang inklusif secara menyeluruh. IPEI mengukur inklusivitas pembangunan melalui tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Pilar-pilar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam delapan sub-pilar dan 21 indikator yang mencakup berbagai aspek sosial ekonomi. Menurut kategorisasi Bappenas, IPEI dibagi ke dalam tiga tingkat, yakni nilai 1–3 dikategorikan sebagai “tidak memuaskan,” nilai 4–7 dikategorikan sebagai “memuaskan,” dan nilai 8–10 dikategorikan sebagai “sangat memuaskan”. Bappenas secara resmi meluncurkan IPEI pada tahun 2018, dan sejak saat itu digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat inklusivitas pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh BPS (2024), Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 57,05 persen terhadap PDB nasional. Di posisi kedua, Pulau Sumatera memberikan sumbangan sebesar 22,01 persen, sedangkan sisanya sebesar 20,94 persen berasal dari gabungan wilayah lain di Indonesia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat pembangunan paling maju di Indonesia. Sebagian besar aktivitas ekonomi nasional terpusat di pulau ini. Keunggulan Jawa didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas dan berkembang pesat, serta infrastruktur yang relatif lengkap.

Berbeda dengan Jawa yang menjadi kontributor terbesar dan memiliki pembangunan yang lebih maju, Pulau Sumatera masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Meskipun berperan sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap PDB nasional, wilayah ini masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang cukup tinggi di sejumlah provinsi. Kemudian, menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2025), Pulau Sumatera masih menghadapi ketidakmerataan akses dan kualitas pelayanan dasar, terutama pada fasilitas serta tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, kapasitas dan mutu infrastruktur di wilayah ini juga masih terbatas, khususnya terkait konektivitas antarwilayah, infrastruktur ekonomi, maupun infrastruktur dasar lainnya.

Sementara itu, pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif lebih kecil dibandingkan Sumatera. Oleh karena itu, Pulau Sumatera dipandang sebagai lokasi penelitian yang strategis, karena selain memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, kawasan ini juga merefleksikan tantangan nyata pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif.

Untuk melihat lebih jelas kondisi pembangunan di tingkat provinsi, berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, gini ratio, dan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2023.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023

Wilayah	PE (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Gini Ratio	IPEI
Aceh	4,23	14,45	0,296	6,02
Sumatera Utara	5,01	8,15	0,309	6,67
Sumatera Barat	4,62	5,95	0,280	6,45
Riau	4,21	6,68	0,324	6,46
Jambi	4,67	7,58	0,343	6,03
Sumatera Selatan	5,08	11,78	0,338	6,31
Bengkulu	4,28	14,04	0,333	6,19
Lampung	4,55	11,11	0,324	6,24
Bangka Belitung	4,38	4,52	0,245	7,00
Kepulauan Riau	5,16	5,69	0,340	6,95
Nasional	5,06	9,36	0,388	6,17

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas 2025, diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1, provinsi-provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yaitu berkisar antara 4% hingga 5%. Sejalan dengan itu, nilai IPEI di sebagian besar provinsi juga berada di atas rata-rata nasional (6,17), kecuali Aceh (6,02) dan Jambi (6,03). Secara keseluruhan, capaian IPEI provinsi-provinsi di Sumatera berada pada kisaran 6,02 hingga 7,00, yang termasuk dalam kategori 'memuaskan'. Namun, tidak semua daerah mampu mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pencapaian indikator kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), serta variasi capaian IPEI antarprovinsi.

Provinsi Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23%, namun memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera, yaitu 14,45%. Meskipun Gini Ratio-nya tergolong rendah (0,296) dan menjadi terendah ketiga di Sumatera, tetapi nilai IPEI-nya merupakan yang paling rendah, yakni 6,02. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh belum disertai dengan pemerataan hasil dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan di provinsi ini belum bersifat inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Demikian pula, Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08%, namun masih disertai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yaitu 11,78%. Provinsi ini juga memiliki ketimpangan pendapatan terbesar kedua di Sumatera (0,338) dan nilai IPEI sebesar 6,31. Sementara itu, Provinsi Bengkulu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28%, dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,04%, Gini Ratio sebesar 0,333, dan nilai IPEI yang relatif rendah, yaitu 6,19. Ketiga provinsi tersebut merupakan contoh nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan pembangunan ekonomi yang inklusif, terutama jika tidak diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan perluasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.

Fenomena ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan capaian kesejahteraan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi di Sumatera belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat inklusivitas pembangunan di setiap wilayah.

Secara teoritis, peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif dijelaskan melalui teori Keynesian dan teori pertumbuhan endogen. Menurut Keynes (1936), pemerintah memiliki peran aktif yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh mekanisme pasar, terutama dalam penyediaan barang dan jasa publik. Intervensi fiskal melalui belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Sejalan dengan pandangan tersebut, teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal fisik, tetapi juga oleh akumulasi pengetahuan dan modal manusia. Investasi pada sektor

pendidikan, teknologi, dan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan barang publik melalui alokasi pengeluaran pemerintah, di mana sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama karena merupakan fondasi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (Ananta et al., 2023). Dengan demikian, belanja pemerintah merupakan instrumen penting dalam menciptakan fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.

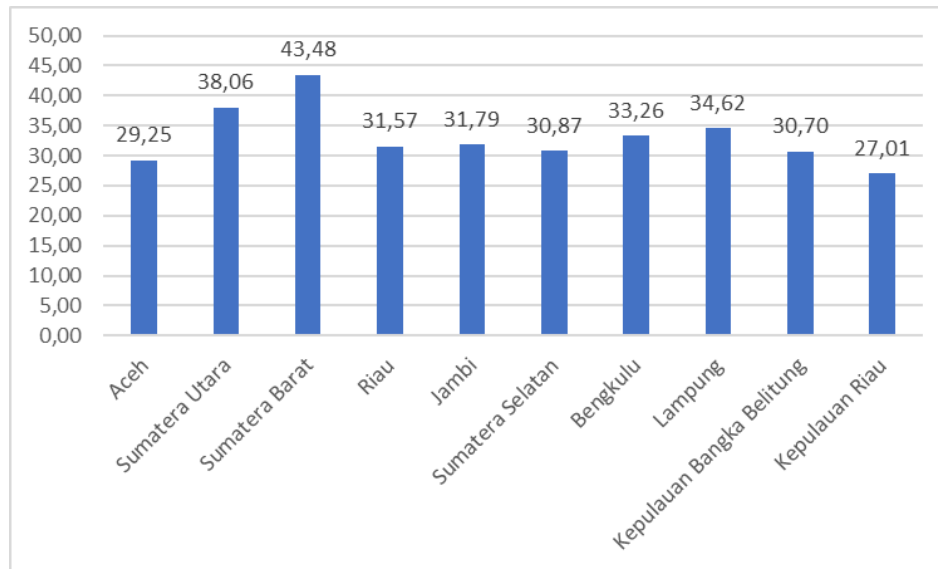
Salah satu bentuk konkret dari intervensi pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif adalah melalui belanja pada sektor pendidikan. Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang strategis karena berkontribusi terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta kapasitas inovasi suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, dikatakan bahwa belanja fungsi pendidikan adalah belanja yang diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di berbagai bidang dengan berlandaskan akhlak mulia, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan penelitian Patel & Annapoorna (2019), bahwa investasi publik di bidang pendidikan membantu meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan hasil pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kemudian Edison & Andriansyah (2023) yang menyebutkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah untuk pendidikan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi landasan vital untuk menciptakan kesempatan yang setara, mengurangi ketimpangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sampai saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai program intervensi, seperti pemberian beasiswa dan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu dan berprestasi sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan (Andi, 2024). Program-program tersebut tidak hanya membuka akses terhadap pendidikan yang layak, tetapi juga menjadi alat untuk pemerataan kesempatan

ekonomi dan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten, pendidikan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, diolah.

Gambar 1. 1 Rata-rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023

Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata persentase belanja pemerintah pada fungsi pendidikan di 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa Provinsi Sumatera Barat mencatat alokasi tertinggi, dengan rata-rata mencapai 43,48%. Diikuti oleh Sumatera Utara (38,06%) dan Lampung (34,62%). Sementara itu, Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan alokasi terendah, yaitu hanya sebesar 27,01%.

Daerah yang membelanjakan anggaran pendidikannya lebih besar cenderung akan lebih siap meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan modal manusia. Sejalan dengan penelitian Mandey et al. (2022) bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan merupakan wujud dari investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa.

Namun, tingginya alokasi anggaran pendidikan tidak serta-merta menjamin capaian pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, Provinsi Aceh memiliki rata-rata belanja pendidikan sebesar 29,25%, namun tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera (14,45%) dan nilai IPEI terendah (6,02) pada tahun 2023. Kemudian hal serupa terjadi di Provinsi Bengkulu yang mencatat alokasi belanja pendidikan sebesar 33,26%, tetapi tetap menghadapi angka kemiskinan yang tinggi (14,04%) dan IPEI yang tergolong rendah (6,19). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum tentu sejalan dengan hasil pembangunan yang inklusif apabila pelaksanaan programnya tidak berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

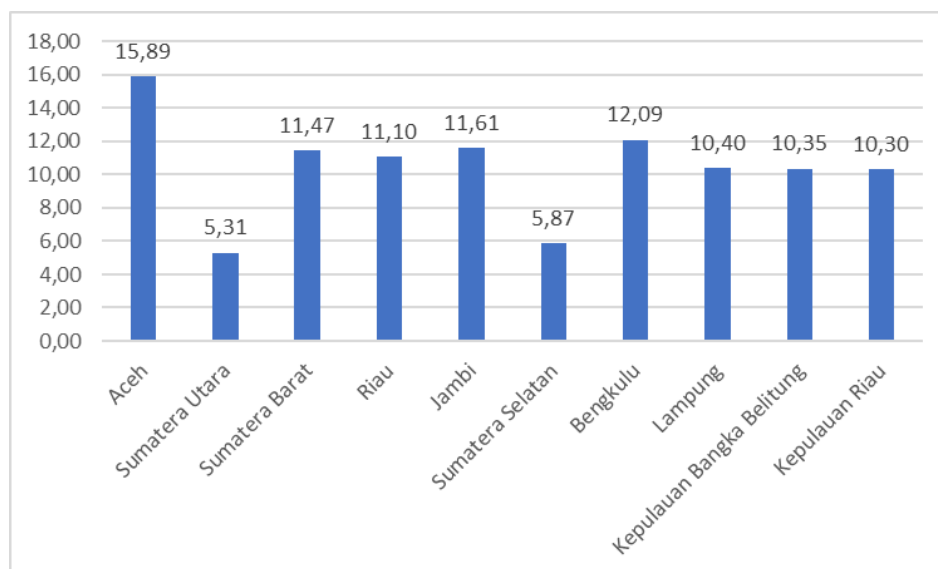
Selain pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan juga berperan vital dalam mendukung pembentukan modal manusia (Becker, 1993). Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan fondasi utama produktivitas kerja, karena kesehatan fisik dan mental yang baik membuat individu lebih produktif, berpenghasilan tinggi, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Selain itu, tingkat kesehatan yang baik juga dapat menurunkan kemiskinan karena memungkinkan seseorang untuk bekerja secara optimal dan memperoleh penghasilan yang layak (Rukmana et al., 2023). Dengan demikian, investasi pada sektor kesehatan menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kuat dan produktif. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas medis, dan program-program kesehatan masyarakat merupakan bentuk nyata dari peran negara dalam membangun modal manusia secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, teori pertumbuhan endogen menempatkan modal manusia sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Lucas, 1988; Romer, 1990). Dalam konteks ini, pembangunan sektor kesehatan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas tenaga kerja.

Secara normatif, peran strategis belanja sektor kesehatan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa belanja fungsi

kesehatan adalah belanja yang ditujukan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Artinya, anggaran di sektor ini bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan juga instrumen pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, belanja pemerintah yang lebih besar di sektor kesehatan dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mandey et al., (2022) bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, khususnya melalui pembangunan fasilitas kesehatan, merupakan bentuk investasi strategis pada sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, serta pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave & Musgrave (1989) bahwa pengeluaran publik di sektor sosial, seperti kesehatan, merupakan instrumen penting dalam mencapai distribusi kesejahteraan yang lebih merata.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, diolah.

Gambar 1. 2 Rata-rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023

Gambar 1.2 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam alokasi belanja pemerintah daerah untuk fungsi kesehatan di 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Provinsi Aceh tercatat sebagai daerah dengan rata-rata belanja fungsi kesehatan tertinggi, yaitu sebesar 15,89% dari total

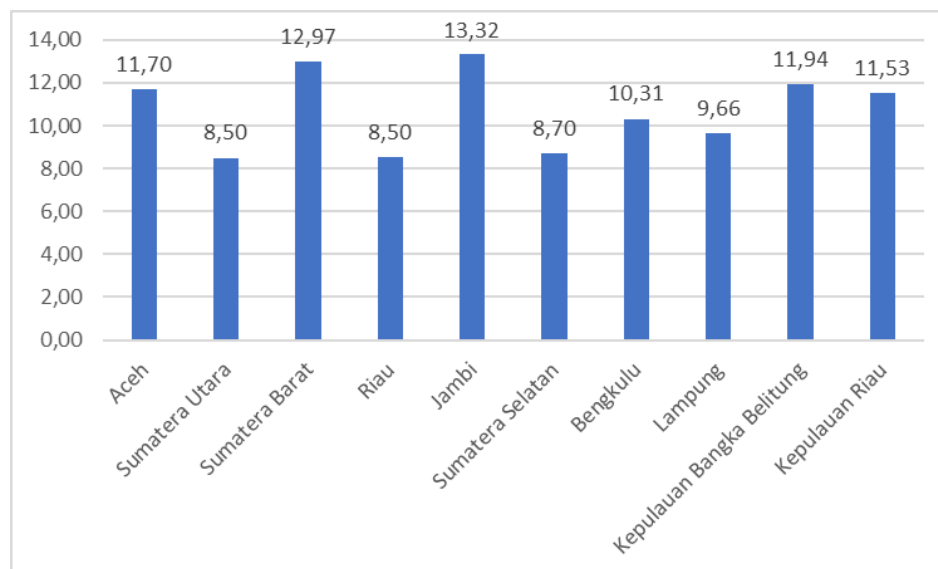
anggaran. Sebaliknya, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan menempati posisi terendah, masing-masing hanya sekitar 5,31% dan 5,87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut belum mencapai batas minimal alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171. Ketimpangan alokasi belanja kesehatan antarprovinsi ini berpotensi menciptakan perbedaan dalam akses serta mutu pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian pembangunan manusia dan mendorong atau menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, mengingat kesehatan adalah unsur kunci dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas penduduk.

Namun, tingginya alokasi anggaran tidak selalu menjamin hasil yang optimal. Efektivitas belanja sangat bergantung pada kualitas pemanfaatan dan implementasi program. Dalam jangka panjang, belanja fungsi kesehatan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga medis dan perbaikan fasilitas layanan. Safitri et al., (2021) menegaskan bahwa agar belanja kesehatan efektif mendorong pembangunan inklusif, anggaran harus digunakan secara tepat sasaran melalui program strategis seperti pelatihan tenaga kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penyesuaian target penerima manfaat. Pelayanan yang lebih baik akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, belanja pemerintah fungsi ekonomi juga memegang peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Belanja fungsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa belanja fungsi ekonomi merupakan belanja yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan termasuk pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi

dan informatika. Melalui belanja fungsi ekonomi, pemerintah tidak hanya menstimulasi pertumbuhan, tetapi juga memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang menjadi fondasi pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Menurut Sary & Anggraini (2024), salah satu bentuk konkret dari belanja fungsi ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung maupun dalam jangka panjang oleh masyarakat. Infrastruktur juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan efek ekonomi berganda (*multiplier effect*) yang memperkuat sirkulasi ekonomi di daerah. Selain itu, belanja ekonomi juga berkaitan erat dengan pemberdayaan UMKM yang memiliki dampak pada pemerataan ekonomi dan pencapaian pembangunan inklusif.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025, diolah.

Gambar 1. 3 Rata-rata Persentase Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2023

Gambar 1.3 menunjukkan rata-rata persentase belanja pemerintah pada fungsi ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Terlihat bahwa Provinsi Jambi mengalokasikan porsi tertinggi, yaitu sebesar 13,32% dari total belanja daerah. Diikuti oleh Sumatera Barat (12,97%), Kepulauan Bangka Belitung (11,94%), dan Aceh (11,70%). Sementara itu, Sumatera Utara dan Riau tercatat sebagai provinsi dengan alokasi terendah, masing-masing hanya sebesar 8,50%.

Perbedaan alokasi belanja fungsi ekonomi di antara provinsi-provinsi di Sumatera berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif. Provinsi yang mengalokasikan belanja lebih besar pada fungsi ekonomi cenderung memiliki peluang lebih besar dalam memperkuat infrastruktur ekonomi, mendorong investasi daerah, serta memperluas kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya alokasi belanja fungsi ekonomi di beberapa provinsi dapat menghambat optimalisasi potensi daerah dan memperlambat peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Purnomoratih & Ramadhani (2023) dalam penelitiannya di Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa belanja fungsi ekonomi yang didominasi oleh pembentukan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti infrastruktur konektivitas dan pengembangan kawasan produksi, terbukti mampu memberikan penguatan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa belanja fungsi ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain dipengaruhi oleh peran belanja pemerintah, pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif juga sangat bergantung pada kondisi ketenagakerjaan, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT mencerminkan persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai akses nyata masyarakat terhadap peluang ekonomi. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya produktivitas dan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Hal tersebut diperkuat oleh temuan Putri & Anggraini (2024), yang menemukan bahwa peningkatan tingkat pengangguran secara signifikan berkontribusi terhadap memburuknya ketimpangan pendapatan. Tingginya jumlah pengangguran menyebabkan semakin banyak individu dan rumah tangga yang hidup di bawah

garis kemiskinan, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Temuan ini relevan dengan dimensi pembangunan ekonomi inklusif, khususnya pada pilar kedua, yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, di mana penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu indikator kunci dalam mendorong pertumbuhan yang lebih adil dan merata.

**Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-Rata Tahun 2018–2023
Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rerata
Aceh	6,34	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03	6,27
Sumatera Utara	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	6,04
Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94	6,11
Riau	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23	5,18
Jambi	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,52
Sumatera Selatan	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	4,67
Bengkulu	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,56
Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,36
Kepulauan Bangka Belitung	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,47
Kepulauan Riau	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80	8,47

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah.

Tabel 1.2 memperlihatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rata-rata TPT periode 2018–2023 provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Secara umum, seluruh provinsi di kawasan ini mengalami lonjakan TPT yang cukup tinggi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dampak terbesar terjadi di Kepulauan Riau, yang mencatat kenaikan TPT sebesar 2,84 poin persentase dibandingkan tahun 2019, dari 7,50% menjadi 10,34%. Kenaikan tersebut menyebabkan rata-rata TPT provinsi ini selama periode 2018–2023 menjadi sangat tinggi, yakni sebesar 8,47%, tertinggi di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, TPT di Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan pascapandemi, dengan angka pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,80%.

Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata TPT terendah selama periode tersebut adalah Bengkulu, yaitu sebesar 3,56%. TPT di Bengkulu juga menunjukkan tren yang

relatif stabil, dengan angka tahun 2023 tercatat sebesar 3,42%, sedikit lebih rendah dari rata-ratanya. Secara umum, sejak tahun 2021 hingga 2023, sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan TPT secara bertahap, yang mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan pascapandemi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, penurunan TPT seharusnya menjadi sinyal meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, terutama kelompok usia produktif dan rentan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat basis konsumsi dan produksi yang lebih merata. Selain itu, rendahnya TPT membuka peluang mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya di daerah dengan akses ekonomi terbatas.

Keterkaitan ini sejalan dengan temuan Ulya et al., (2025) yang menunjukkan bahwa kenaikan angka pengangguran sangat berkorelasi dengan meningkatnya angka kemiskinan. Ketika semakin banyak individu tidak memiliki pekerjaan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, TPT bukan sekadar indikator ketenagakerjaan, melainkan refleksi dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dengan demikian, menurunkan TPT secara berkelanjutan merupakan prasyarat penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif di tingkat provinsi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kesempatan kerja yang adil, layak, dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pulau Sumatera memiliki kontribusi ekonomi yang besar secara nasional, pencapaian pembangunan ekonomi inklusif masih menjadi tantangan serius di berbagai provinsi. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dengan capaian kesejahteraan masyarakat terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di beberapa daerah, meskipun belanja pemerintah di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah dikeluarkan dalam jumlah yang

besar. Hal ini menegaskan pentingnya mengkaji efektivitas dan arah alokasi anggaran publik, serta bagaimana kondisi ketenagakerjaan turut memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.

Berbagai penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif telah banyak dilakukan, dan menunjukkan temuan yang bervariasi. Safitri et al., (2021) menemukan bahwa dalam jangka panjang belanja pemerintah fungsi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini diperkuat oleh Arrfah & Syafri (2022) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi kesehatan juga berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Faizin & Prabowo (2022) di Provinsi Jawa Tengah, di mana belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan, dan belanja pendidikan justru berpengaruh negatif terhadap IPEI pilar 1. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja sektor strategis terhadap pembangunan ekonomi inklusif dapat sangat bergantung pada konteks daerah, efektivitas implementasi kebijakan, dan dimensi inklusivitas yang diukur.

Dalam konteks internasional, Ekong et al., (2024) menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang, pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja pemerintah tidak hanya bergantung pada seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga pada jenis belanja yang dipilih, jangka waktu pelaksanaannya, serta kinerja lembaga yang menjalankannya.

Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, hasil penelitian oleh Safitri et al., (2021) dan Oktavia (2024) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif signifikan terhadap IPEI, yang menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran dapat menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif. Begitupun penelitian oleh Saad (2024) yang meneliti 9 negara berkembang menemukan bahwa TPT juga berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan inklusif.

Dengan demikian, temuan-temuan sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara belanja publik dan ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi inklusif bersifat kontekstual, bergantung pada karakteristik wilayah, efektivitas implementasi kebijakan, serta dimensi inklusivitas yang digunakan. Keragaman hasil ini mengindikasikan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya pada konteks regional seperti Pulau Sumatera. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam mendorong atau menghambat pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah ini.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, hasilnya belum sepenuhnya mampu mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif di seluruh wilayah. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera masih menghadapi tantangan serius, seperti tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara input kebijakan dan capaian pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitas belanja pemerintah di sektor-sektor strategis tersebut, serta bagaimana kondisi ketenagakerjaan turut memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terhadap pembangunan ekonomi inklusif di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2018–2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023?

- b. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023?
- c. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi ekonomi terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023?
- d. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023?
- e. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, dan TPT secara simultan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.
- b. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.
- c. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi ekonomi terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.
- d. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.
- e. Menganalisis pengaruh belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, dan TPT secara simultan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang ekonomi pembangunan, melalui analisis empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

b) Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah provinsi-provinsi di Sumatera dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, terutama terkait alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta partisipasi tenaga kerja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

Menurut pandangan Keynes (1936), perekonomian atau pasar tidak mampu berfungsi secara optimal tanpa keterlibatan pemerintah karena berisiko mengalami kegagalan pasar yang dapat merugikan kelompok ekonomi yang lebih lemah. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk turut campur baik secara aktif maupun pasif. Sejalan dengan Ridwan & Nawir (2021) yang mengatakan bahwa paham liberalisme dan kapitalisme murni berpendapat bahwa kebebasan individu menolak intervensi pemerintah dalam pengaturan ekonomi, kecuali pada aspek-aspek yang tidak dapat diatur sendiri oleh individu.

Menurut Mangkoesoebroto (2016), pada sistem persaingan sempurna, mekanisme harga hanya mampu memastikan efisiensi dalam pembagian barang konsumsi dan penggunaan faktor produksi. Namun, mekanisme ini tidak dapat menjamin pemerataan distribusi barang, karena efisiensi yang dihasilkan dapat membuat satu pihak memperoleh seluruh barang sementara pihak lain tidak memperoleh apa pun. Dalam konteks ini, pemerintah berperan melakukan pemerataan pendapatan melalui alokasi dan distribusi sumber daya secara adil, serta melakukan intervensi ekonomi guna menjaga stabilitas keuangan.

Menurut Mangkoesoebroto (2016) dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

1. Alokasi

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berperan menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan kesehatan.

2. Distribusi

Pemerintah berperan sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat melalui kebijakan pajak dengan pengenaan pajak progresif yang lebih adil dalam distribusi kekayaan dan program sosial dengan berbagai program bantuan sosial seperti subsidi pangan, perumahan murah, dan pendidikan untuk kelompok masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi kesempatan yang sama untuk semua individu.

3. Stabilisasi

Pemerintah berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi agar tidak terjadi fluktuasi yang ekstrem seperti inflasi atau resesi. Pemerintah perlu melakukan intervensi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif, peran belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan adil. Melalui alokasi anggaran yang tepat pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pemerintah dapat memperluas akses dan kesempatan bagi kelompok rentan, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Siregar et al., 2025). Hal tersebut berperan langsung dalam mendorong tercapainya pembangunan ekonomi inklusif, yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang mampu menyediakan akses dan peluang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil, meningkatkan taraf hidup, serta menekan kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

2.1.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Klasen (2010) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dianggap berhasil jika tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Pembangunan yang inklusif harus mencakup dua dimensi utama, yaitu proses dan hasil. Secara proses, pembangunan inklusif berarti seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap peluang

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Sementara secara hasil, pembangunan harus mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan secara lebih cepat dibanding kelompok lain. Klasen secara khusus menyebut pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif sebagai “*disadvantage-reducing growth*”, yaitu pertumbuhan yang secara nyata mengurangi keteringgalan kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Klasen juga menyoroti pentingnya indikator non-pendapatan, seperti kualitas pendidikan dan kesehatan, dalam menilai inklusivitas suatu pertumbuhan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan PDB, tetapi dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu memperluas akses, mengurangi eksklusi sosial, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menurut Klasen merupakan pendekatan yang menuntut keadilan dalam distribusi peluang dan hasil, serta menempatkan manusia sebagai pusat proses pembangunan.

2.1.2.2 Hukum Wagner

Hukum Wagner merupakan teori yang dikemukakan oleh Adolph Wagner pada akhir abad ke-19 dan menjadi salah satu landasan teoritis dalam memahami dinamika pengeluaran pemerintah. Menurut Mangkoesoebroto (2016), Hukum Wagner adalah suatu kondisi dalam perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Peningkatan ini didorong oleh naiknya permintaan masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Hukum ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan tekanan sosial dan politik yang mendorong pemerintah untuk memperluas peran dan intervensinya dalam perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan belanja publik khususnya pada sektor-sektor yang mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas hidup, dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka tetapi juga merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah dapat mencerminkan komitmen negara dalam menjamin akses dan peluang ekonomi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

2.1.2.3 Teori Keynesian

Teori ekonomi Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada awal abad ke-20 menekankan bahwa permintaan agregat merupakan faktor utama penentu tingkat output dan lapangan kerja dalam perekonomian. Keynes mengkritik pandangan klasik bahwa pasar selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis, terutama dalam situasi krisis seperti Depresi Besar. Keynes mengatakan bahwa ketika permintaan agregat menurun, konsumsi dan investasi akan melemah, mengakibatkan penurunan produksi dan meningkatnya pengangguran. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi penting, terutama melalui kebijakan fiskal berupa peningkatan pengeluaran. Konsep *multiplier* dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah dapat menciptakan efek berantai yang memperbesar dampak terhadap pendapatan nasional. Dalam konteks penelitian ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan lemahnya permintaan agregat yang dapat diatasi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Dengan meningkatkan belanja publik, pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) merupakan respons terhadap kelemahan teori pertumbuhan neoklasik yang menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh faktor internal dalam perekonomian, khususnya investasi pada pengetahuan, modal manusia, dan inovasi teknologi. Romer menjelaskan bahwa pengetahuan bersifat *non-rival* dan menghasilkan *increasing returns to scale*, sehingga semakin besar investasi dalam pengetahuan dan pendidikan, semakin tinggi potensi peningkatan produktivitas ekonomi. Lucas menambahkan bahwa akumulasi modal manusia tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga menghasilkan efek limpahan (*spillover effect*) melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, belanja pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan dapat menjadi investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat penting karena

dapat memperkuat kapasitas produktif penduduk. Ma'ruf & Wihastuti (2008) menegaskan bahwa investasi pada modal fisik maupun modal manusia menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, pengalokasian belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan berperan sebagai instrumen strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.5 Teori Kapabilitas

Teori kapabilitas dikembangkan oleh Amartya Sen sebagai pendekatan alternatif terhadap paradigma pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Sen (1999), pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kapabilitas, yaitu kemampuan nyata seseorang untuk melakukan dan menjadi sesuatu yang ia nilai penting. Dalam konteks ini, pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk hidup sehat, berpendidikan, dan hidup layak. Teori ini menekankan kebebasan dan pilihan individu sebagai inti dari kesejahteraan, bukan sekadar akumulasi sumber daya atau keterampilan. Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif, teori ini sangat relevan karena menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan akses dan peningkatan kapabilitas seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang inklusif bukan hanya berfokus pada peningkatan output, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu memperoleh peluang yang adil untuk terlibat dan merasakan manfaat pembangunan. Dalam konteks ini, pengembangan kualitas manusia melalui belanja di sektor pendidikan dan kesehatan mencerminkan pencapaian kemampuan dasar yang menjadi landasan utama bagi pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Maka, pendekatan kapabilitas memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif hanya dapat tercapai apabila pertumbuhan disertai dengan peningkatan akses, partisipasi, dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.1.2.6 Teori Modal Manusia

Teori modal manusia menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan sebagai modal yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan

individu. Menurut Becker (1993), modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan individu yang memungkinkan mereka berkontribusi secara optimal dalam kegiatan ekonomi. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan, sementara kesehatan menjaga kapasitas kerja dan produktivitas. Kedua aspek ini memiliki peran krusial dalam mendorong efisiensi ekonomi, mempercepat pertumbuhan, serta menekan angka kemiskinan. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan menjadi instrumen strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompetitif, sehingga menunjang terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Teori ini menitikberatkan pada nilai ekonomi dari peningkatan kapasitas individu sebagai faktor utama dalam pembangunan.

2.1.3 Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan tidak hanya pada laju dan besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat dari pertumbuhan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut Ali & Zhuang (2007), pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan memperoleh manfaat pertumbuhan tersebut.

Sejalan dengan itu, Ianchovichina & Lundstrom (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak sekadar berfokus pada peningkatan kecepatan dan besarnya ekonomi, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam investasi dan memperoleh pekerjaan yang layak serta produktif.

Kedua definisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan inklusif mencakup dua komponen penting: (1) penciptaan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, serta (2) perluasan akses terhadap peluang ekonomi, seperti pekerjaan produktif, pendidikan, dan layanan dasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan prasyarat untuk menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Menurut Ali & Zhuang (2007), strategi pertumbuhan inklusif harus memiliki dua pilar utama yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak. Selain itu, negara-negara berkembang perlu melakukan transformasi struktural dengan beralih dari sektor pertanian ke industri dan layanan sembari melakukan investasi besar dalam infrastruktur fisik dan modal manusia, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Inklusi sosial

Inklusi sosial memerlukan intervensi publik dalam tiga area utama untuk memastikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi.

- a) Investasi dalam pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kapasitas manusia, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung.
- b) Kebijakan yang baik dan institusi yang kuat diperlukan untuk mendorong keadilan sosial dan ekonomi, serta menciptakan kesetaraan peluang dan akses bagi semua individu.
- c) Jaring pengaman sosial harus disediakan untuk melindungi individu dari kemiskinan ekstrem dan memberikan dukungan bagi mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya inklusi sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, strategi pertumbuhan inklusif menurut Ali & Zhuang (2007) tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi juga pada pembangunan manusia, penguatan kelembagaan, serta perlindungan sosial. Ketiga aspek ini merupakan fondasi penting agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Strategi ini menjadi

sangat relevan dalam konteks pembangunan di negara berkembang, di mana tantangan kesenjangan dan eksklusi sosial masih cukup besar.

2.1.4 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ekonomi inklusif didefinisikan sebagai pembangunan yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antarwilayah. Untuk mendukung pengukuran keberhasilan pembangunan yang lebih komprehensif, pemerintah melalui Bappenas mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

IPEI merupakan alat ukur komposit yang dikembangkan dan diluncurkan oleh Bappenas pada tahun 2018. Indeks ini dirancang untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Gambar berikut menyajikan struktur tiga pilar, delapan sub-pilar, dan 21 indikator pembentuk IPEI sebagaimana dikembangkan oleh Bappenas.

Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3
Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	Perluasan Akses dan Kesempatan
Sub Pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi	Sub Pilar 2.1: Ketimpangan	Sub Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia
Indikator: 1. Pertumbuhan PDRB riil per kapita 2. Share manufaktur terhadap PDRB 3. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal	Indikator: 1. Rasio Pendapatan Gini 2. Sumbangan Pendapatan Perempuan 3. Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota	Indikator: 1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 3. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Sub Pilar 1.2: Kesempatan Kerja	Sub Pilar 2.2: Kemiskinan	Sub Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar
Indikator: 1. Tingkat Kesempatan Kerja 2. Persentase Penduduk Bekerja Penuh 3. Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah Atas	Indikator: 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari	Indikator: 1. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak 2. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri
Sub Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi		Sub Pilar 3.3: Keuangan Inklusif
Indikator: 1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN 2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam 3. Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang		Indikator: 1. Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif 2. Rasio Kredit Perbankan UMKM

Sumber: Bappenas 2025, diolah.

Gambar 2. 1 Pilar, Sub Pilar, dan Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Angka IPEI dibentuk dari tiga pilar utama, delapan sub-pilar, dan 21 indikator. Tiga pilar utama tersebut mencakup: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Setiap pilar terdiri dari sejumlah sub-pilar dan indikator spesifik yang mencerminkan keterkaitan antara dimensi ekonomi dan sosial dalam pembangunan yang inklusif.

Untuk memperoleh nilai IPEI secara komprehensif, setiap indikator dihitung berdasarkan rumus tertentu yang mencerminkan karakteristik masing-masing aspek. Berikut disajikan penjelasan dan rumus penghitungan dari 21 indikator pembentuk IPEI:

2.1.4.1 Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.

a. Sub Pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi

Indikator:

1. Pertumbuhan PDRB riil per kapita

Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dialami setiap individu di suatu daerah. Kenaikan pertumbuhan ini umumnya mencerminkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilainya diperoleh dengan membagi PDB/PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pada wilayah dan periode tertentu, sehingga menghasilkan besaran PDB/PDRB riil per orang (telah disesuaikan dengan inflasi), yang kemudian dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$\text{Pertumbuhan PDRB per kapita} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

$$\text{PDRB per kapita (Y)} = \frac{\text{PDB (PDRB)}}{\sum \text{penduduk}}$$

2. Share manufaktur terhadap PDRB

Share (besaran) sektor manufaktur terhadap PDB/PDRB adalah persentase porsi sektor manufaktur terhadap keseluruhan PDB/PDRB. Industri manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan proses pengolahan

bahan dasar, baik secara mekanis, kimiawi, maupun manual, menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kegiatan ini juga mencakup peningkatan nilai suatu barang dari yang bernilai rendah menjadi lebih tinggi, dengan karakteristik produk yang lebih dekat kepada konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah layanan industri serta aktivitas perakitan (*assembling*).

Rumus:

$$\text{Share manufaktur} = \frac{\text{PDB (PDRB) industri pengolahan}}{\text{Total PDB (PDRB)}} \times 100\%$$

3. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

Rasio kredit perbankan terhadap PDB/PDRB diperoleh dengan membandingkan total kredit yang disalurkan dengan total PDRB, sehingga mencerminkan proporsi penyaluran kredit terhadap kinerja atau produktivitas ekonomi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana jumlah pinjaman yang diberikan berkontribusi terhadap total output suatu perekonomian.

Rumus:

$$\text{Rasio Kredit} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total PDB (PDRB)}}$$

b. Sub Pilar 1.2: Kesempatan Kerja

Indikator:

1. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja (TKK) menunjukkan peluang bagi individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan atau terserap di pasar kerja. Semakin tinggi nilai TKK, semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Rumus:

$$\text{Tingkat Kesempatan Kerja} = \frac{\sum \text{penduduk bekerja}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

2. Persentase Penduduk Bekerja Penuh

Penduduk bekerja penuh adalah pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam seminggu adalah lebih dari atau sama dengan 35 jam (≥ 35 jam). Pekerja penuh menunjukkan pekerjaan yang relatif lebih stabil serta memberikan paket

tunjangan yang lebih baik bagi individu. Dengan jam kerja penuh, seseorang cenderung memiliki penghasilan yang lebih terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Pekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam umumnya dikategorikan sebagai pekerja formal.

Rumus:

$$\text{Penduduk Bekerja Penuh} = \frac{\sum \text{penduduk bekerja} \geq 35 \text{ jam/mg}}{\sum \text{penduduk bekerja}} \times 100\%$$

3. Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas

Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas umumnya mencerminkan kualitas pekerja yang lebih baik. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh pekerjaan yang lebih profesional. Ketersediaan tenaga kerja berkualitas berkontribusi pada peningkatan inklusivitas ekonomi, karena memberikan peluang dan akses kerja yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rumus:

$$\text{Pekerja berpendidikan} = \frac{\sum \text{Tenaga kerja dg tk pendidikan menengah ke atas}}{\sum \text{penduduk bekerja}} \times 100\%$$

c. Sub Pilar 1.3: Infrastruktur Ekonomi

Indikator:

1. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik/PLN

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN adalah persentase rumah tangga yang memiliki jaringan atau akses listrik/PLN dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga. Indikator ini, yang juga dikenal sebagai tingkat elektrifikasi, mencerminkan perluasan akses serta manfaat ekonomi, mengingat pembangunan ekonomi diawali dengan tersedianya infrastruktur kelistrikan. Ketersediaan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat mendorong percepatan aktivitas ekonomi.

Rumus:

$$\text{Elektrifikasi} = \frac{\sum \text{Rumah tangga dengan akses listrik (PLN)}}{\sum \text{Rumah tangga}} \times 100\%$$

2. Persentase Penduduk yang memiliki telepon genggam

Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam adalah persentase penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler. Indikator ini

mencerminkan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan perangkat telekomunikasi elektronik tersebut. Pemanfaatan ponsel berperan sebagai sarana yang mendukung pemerataan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi.

Rumus:

$$\text{Penduduk dg Ponsel} = \frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki ponsel}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$$

3. Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

Persentase jalan berkondisi baik dan sedang dihitung berdasarkan perbandingan antara total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap luas wilayah. Total panjang jalan dengan kondisi baik mencerminkan tingkat keterjangkauan infrastruktur transportasi dan kelancaran aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Rumus:

$$\text{Persentase Jalan Baik} = \frac{\sum \text{Panjang jalan baik}}{\text{Total Luas Wilayah}} \times 100\%$$

2.1.4.2 Pilar 2: Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

a. Sub Pilar 2.1: Ketimpangan

Indikator:

1. Rasio Pendapatan Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa (ketimpangan sempurna). Rasio Gini atau juga disebut koefisien Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio Gini yang tinggi menggambarkan ketimpangan ekonomi yang juga tinggi.

Rumus:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

Di mana:

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

P_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i

F_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

F_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-
($i-1$)

2. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Nilainya diperoleh dari perkalian proporsi angkatan kerja perempuan dengan rasio upah perempuan terhadap rata-rata upah. Semakin besar sumbangan pendapatan perempuan, semakin baik tingkat pemerataan dan kualitas perekonomian.

Rumus:

$$X = AK_f \times Rasio W_f$$

Di mana:

X : Sumbangan pendapatan Perempuan

AK_f : Proporsi Angkatan kerja Perempuan

$Rasio W_f$: Rasio upah Perempuan terhadap rata-rata upah (W)

Sementara,

$$Rasio W_f = \frac{W_f}{W}$$

Di mana:

W_f : Rasio upah Perempuan terhadap upah laki-laki nonpertanian

W : Rata-rata upah

Dan rata-rata upah didapatkan dari:

$$W = (W_m \times AK_m) + (W_f \times AK_f)$$

Di mana:

AK_m : Proporsi Angkatan kerja laki-laki

W_m : Rasio upah laki-laki terhadap upah laki-laki nonpertanian (bernilai 1)

3. Rasio Rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota

Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa terhadap kota menggambarkan perbandingan tingkat pengeluaran rata-rata rumah tangga di wilayah pedesaan dengan di wilayah perkotaan. Indikator ini juga mencerminkan kesenjangan antara kedua wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar tingkat pemerataan antara masyarakat desa dan kota.

Rumus:

$$\text{Rasio desakota} = \frac{\text{Rata - rata pengeluaran penduduk desa}}{\text{Rata - rata pengeluaran penduduk kota}}$$

b. Sub Pilar 2.2: Kemiskinan

Indikator:

1. Persentase penduduk miskin

Persentase penduduk miskin merupakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai batas pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori bagi aktivitas tubuh, ditambah kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.

Rumus:

$$\text{Persentase Penduduk Miskin} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

2. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari dihitung dari total protein yang berasal dari komoditas pangan yang dikonsumsi penduduk di suatu daerah, dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini mencerminkan kandungan gizi protein dari bahan pangan yang diolah di rumah. Tingginya rata-rata konsumsi protein dapat menjadi salah satu ukuran peningkatan kesejahteraan dan upaya keluar dari kemiskinan.

$$\text{Rata - rata konsumsi protein/kapita} = \frac{\text{Jumlah konsumsi protein}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

2.1.4.3 Pilar 3: Perluasan Akses dan Kesempatan

a. Sub Pilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Indikator:

1. Angka Harapan Lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata lama waktu sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa peluang anak tersebut untuk terus bersekolah pada usia-usia berikutnya sama dengan peluang penduduk yang sedang bersekolah pada usia yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas dan digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang diukur berdasarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak.

Rumus:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Di mana:

HLS: Harapan Lama Sekolah

FK: Faktor Koreksi Pesantren

E: Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t*

P: Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t*

i: usia (*a*, *a*+1, ..., *n*)

2. Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Indikator ini menunjukkan capaian pelayanan imunisasi lengkap bagi balita. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pelaksanaan program pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemberian imunisasi. Balita dengan imunisasi dasar lengkap (PBD) adalah anak yang telah menerima imunisasi DPT tiga kali, polio tiga kali, serta imunisasi BCG dan campak. Yang dimaksud balita di sini adalah anak berusia di bawah 5 tahun.

Rumus:

$$PBD = \frac{\text{Jumlah balita dengan imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah anak usia} < 5 \text{ tahun}} \times 100\%$$

3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan menggambarkan tingkat cakupan perlindungan kesehatan di masyarakat. Jaminan kesehatan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat ketika menghadapi masalah kesehatan. Keberadaan jaminan ini menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas hidup, karena membantu meringankan beban finansial masyarakat saat mengalami gangguan kesehatan.

Rumus:

$$JK = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

b. Sub Pilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Indikator:

1. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum berkualitas (layak) dengan total rumah tangga. Indikator ini berfungsi untuk memantau ketersediaan sumber air aman bagi masyarakat, dengan asumsi bahwa air berkualitas memberikan jaminan keamanan untuk dikonsumsi. Air yang tidak layak merupakan salah satu penyebab utama berbagai penyakit. Air minum layak mencakup sumber air terlindung seperti air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH), mata air terlindung, sumur terlindung, sumur bor, atau sumur pompa yang berjarak minimal 10 meter dari pembuangan limbah, penampungan kotoran, dan tempat pembuangan sampah. Sumber yang tidak termasuk kategori layak antara lain air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual menggunakan tangki, serta air sumur atau mata air yang tidak terlindung.

Rumus:

$$\text{Air Minum Layak} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga dengan air minum layak}}{\sum \text{Rumah Tangga seluruhnya}} \times 100\%$$

2. Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air sendiri adalah rasio antara jumlah rumah tangga dengan fasilitas buang air sendiri terhadap total rumah tangga. Keberadaan fasilitas buang air di rumah tangga menjadi salah satu syarat sanitasi layak, yang sekaligus menjadi indikator kelayakan hidup dan tingkat kesejahteraan.

Rumus:

$$\text{Sanitasi} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga dengan fasilitas buang air sendiri}}{\sum \text{Rumah Tangga seluruhnya}} \times 100\%$$

c. Sub Pilar 3.3: Keuangan Inklusif

Indikator:

1. Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap penduduk usia produktif

Rasio rekening dana pihak ketiga (DPK) terhadap penduduk usia produktif dihitung dengan membagi total rekening DPK perbankan dengan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun (penduduk dewasa). Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memanfaatkan produk dan layanan keuangan, yang merupakan salah satu dimensi keuangan inklusif..

Rumus:

$$\text{Rasio DPK} = \frac{\text{Total rekening DPK perbankan}}{\text{Total penduduk dewasa}}$$

DPK = Dana Pihak Ketiga (rekening deposito, giro, dan Tabungan)

2. Rasio kredit perbankan UMKM

Rasio kredit perbankan UMKM menggambarkan proporsi jumlah rekening kredit yang diberikan perbankan untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan total rekening kredit perbankan. Peningkatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM mencerminkan perkembangan ekonomi yang mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha berskala kecil maupun masyarakat berpendapatan rendah.

Rumus:

$$\text{Rasio Kredit UMKM} = \frac{\text{Jumlah Rekening Kredit UMKM}}{\text{Total Rekening Kredit Perbankan}}$$

Dengan menggunakan 21 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga pilar dan delapan sub-pilar, penghitungan IPEI dilakukan secara sistematis untuk mencerminkan tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Nilai akhir IPEI berada dalam rentang 1 hingga 10, yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan inklusif. Semakin tinggi nilai IPEI, maka semakin baik pula pemerataan hasil pembangunan ekonomi serta perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh kelompok masyarakat. Berdasarkan kategorisasi Bappenas, nilai IPEI diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: Nilai 1–3 dikategorikan sebagai “tidak memuaskan”, nilai 4–7 sebagai “memuaskan”, dan nilai 8–10 sebagai “sangat memuaskan.”

Dengan demikian, IPEI tidak hanya menilai pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan.

2.1.5 Belanja Negara

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara, pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, APBN memuat tiga komponen pokok, yaitu pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan anggaran.

Anggaran belanja negara terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga dan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, belanja negara dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, yang terdiri dari transfer ke daerah dan anggaran pemerintah pusat.

Dalam PMK Nomor 102/PMK.02/2018, dijelaskan bahwa belanja negara dirinci menurut tiga klasifikasi utama, yaitu:

1. Klasifikasi Organisasi.

Belanja negara berdasarkan klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran berdasarkan struktur organisasi Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelompokan ini disusun berdasarkan jumlah dan susunan Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat. Kode dan

nomenklatur bagian anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga digunakan untuk menyusun pengelompokan ini.

2. Klasifikasi Fungsi.

Belanja negara berdasarkan klasifikasi fungsi merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah anggaran pada setiap fungsi atau subfungsi merupakan hasil penggabungan dari program-program yang masuk dalam fungsi atau subfungsi tersebut.

3. Klasifikasi Jenis Belanja.

Belanja negara berdasarkan klasifikasi jenis belanja merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan kategori belanja pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelompokan ini digunakan dalam dokumen anggaran, baik pada tahap penyusunan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban/pelaporan. Klasifikasi jenis belanja bertujuan untuk menggambarkan distribusi alokasi anggaran ke masing-masing kategori belanja. Terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, dalam penyusunan anggaran Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga jenis belanja yang digunakan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan bantuan sosial. Sementara itu, dalam proses penyusunan anggaran Bagian Anggaran BUN jenis belanja yang digunakan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

2.1.6 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.02/2018, klasifikasi fungsi dalam belanja negara merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN). Perincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi dimaksudkan untuk menganalisis fungsi-fungsi yang menerima alokasi anggaran terbesar maupun terkecil.

PMK tersebut menyebutkan bahwa klasifikasi fungsi yang digunakan dalam sistem penganggaran di Indonesia merujuk pada *Classification of the Functions of Government* (COFOG), yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan diadopsi dalam *Government Finance Statistics* (GFS) Manual 2001 milik *International Monetary Fund* (IMF), dengan penyesuaian berupa pemisahan fungsi agama dari kelompok fungsi rekreasi, budaya, dan agama (*recreation, culture, and religion*).

Besaran anggaran setiap fungsi atau subfungsi dihitung dari penggabungan seluruh program yang termasuk di dalamnya. Data anggaran hasil penggabungan ini kemudian disusun menjadi statistik sesuai dengan standar internasional COFOG yang diterbitkan PBB. Dengan demikian, klasifikasi belanja berdasarkan fungsi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memantau perkembangan pengeluaran suatu negara menurut fungsi, subfungsi, dan program, sekaligus memungkinkan perbandingan dengan negara lain yang menggunakan klasifikasi COFOG.

Belanja menurut klasifikasi fungsi dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Dari sebelas fungsi yang diklasifikasikan dalam sistem penganggaran pemerintah tersebut, tidak seluruhnya digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan fungsi belanja dibatasi pada fungsi-fungsi yang secara teoritis dan empiris memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Terdapat tiga belanja berdasarkan fungsi yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi, yang merepresentasikan aspek pembangunan sumber daya manusia dan dukungan terhadap sektor produktif yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

2.1.6.1 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Anggaran pendidikan adalah alokasi dana, termasuk belanja pembiayaan, yang disalurkan melalui kementerian/lembaga, nonkementerian/lembaga, dan transfer ke daerah (TKD), yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola program pendidikan serta pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk pembayaran gaji pendidik. UU tersebut juga menyebutkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi pendidikan adalah belanja yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang dengan berlandaskan akhlak mulia, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Ketentuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4), yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN maupun APBD. Penetapan persentase tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, alokasi anggaran pendidikan dalam klasifikasi fungsi anggaran pemerintah dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa subfungsi. Subfungsi ini merepresentasikan bentuk konkret pelaksanaan anggaran pendidikan di berbagai jenjang dan aspek, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, serta layanan pendukung lainnya.

Menurut PMK Nomor 102/PMK.02/2018, belanja pemerintah fungsi pendidikan terdiri atas dua belas subfungsi utama, yaitu: (1) Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Pendidikan Dasar; (3) Pendidikan Menengah; (4) Pendidikan Nonformal dan Informal; (5) Pendidikan Kedinasan; (6) Pendidikan Tinggi; (7) Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan; (8) Pendidikan Keagamaan; (9) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan; (10) Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga; (11) Pengembangan Budaya; (12) Pendidikan Lainnya.

Rincian belanja dari masing-masing subfungsi meliputi pembiayaan kegiatan penyediaan layanan pendidikan, kegiatan administrasi, operasional, serta pemberian bantuan pendidikan seperti beasiswa, hibah, dan insentif.

Berikut adalah penjelasan klasifikasi dalam subfungsi pendidikan:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, mencakup penyediaan layanan PAUD umum dan keagamaan, kegiatan pendukungnya, serta pemberian bantuan pendidikan untuk peserta didik usia dini.
- 2) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat SD–SMA, baik umum maupun agama, termasuk operasional sekolah dan bantuan siswa.
- 3) Pendidikan Nonformal dan Informal, mencakup penyediaan layanan pendidikan nonformal dan informal, kegiatan pendukungnya, serta pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa, hibah, atau insentif bagi peserta didik.
- 4) Pendidikan Kedinasan dan Pendidikan Tinggi, mencakup pembiayaan institusi pendidikan kedinasan serta universitas negeri dan perguruan tinggi keagamaan, berikut bantuan bagi mahasiswa.
- 5) Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan, mencakup belanja untuk fasilitas pendukung seperti transportasi, makanan, penginapan, serta layanan kesehatan bagi siswa diberbagai tingkat.
- 6) Pendidikan Keagamaan, yakni penyediaan pendidikan berbasis agama dan bantuannya.
- 7) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, mencakup belanja kegiatan administrasi dan operasional lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dalam kegiatan penelitian terapan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 8) Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, mencakup kegiatan dukungan dan operasional untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga.
- 9) Pengembangan Budaya, mencakup penyediaan layanan dan administrasi kebudayaan, pengawasan dan pelestarian warisan budaya, penataan serta pengelolaan lokasi kebudayaan, dukungan terhadap fasilitas kebudayaan, serta pelaksanaan acara atau kegiatan budaya

- 10) Pendidikan Lainnya, mencakup kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pengaturan kebijakan pendidikan, serta penyusunan data dan statistik pendidikan.

Setiap subfungsi ini memiliki komponen belanja yang mencakup kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional, serta dukungan teknis lainnya. Dengan struktur subfungsi tersebut, alokasi belanja fungsi pendidikan dapat diarahkan secara lebih spesifik untuk menjangkau seluruh aspek layanan pendidikan, mulai dari akses, kualitas, hingga keberlanjutan.

Pemerintah memandang sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, karena memiliki peran mendasar dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas akan mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Sejalan dengan Edison & Andriansyah (2023) yang mengatakan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah untuk pendidikan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. Peningkatan investasi pada pendidikan yang merata dan bermutu merupakan dasar penting untuk mewujudkan kesetaraan peluang, menekan kesenjangan, serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan dengan optimal, transparan, dan berorientasi pada hasil agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan sekaligus pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang kemudian akan berkontribusi terhadap perekonomian.

2.1.6.2 Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, belanja pada fungsi kesehatan merupakan belanja pemerintah pusat yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa anggaran pemerintah di sektor kesehatan dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan layanan

kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, serta pembangunan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen negara terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah menetapkan alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar komponen gaji, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan sebagai bagian dari hak asasi warga negara.

Sejalan dengan komitmen tersebut, alokasi anggaran pendidikan dalam klasifikasi fungsi anggaran pemerintah dirinci lebih lanjut ke dalam beberapa subfungsi. Subfungsi ini merepresentasikan bentuk konkret pelaksanaan anggaran kesehatan di berbagai aspek.

Menurut PMK Nomor 102/PMK.02/2018, belanja pemerintah fungsi kesehatan terdiri atas enam subfungsi utama, yaitu: (1) Obat dan Peralatan Kesehatan; (2) Pelayanan Kesehatan Perorangan; (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat; (4) Keluarga Berencana; (5) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; (6) Kesehatan Lainnya.

Belanja pemerintah fungsi kesehatan dalam klasifikasi fungsi anggaran mencakup berbagai aspek layanan dan dukungan kesehatan masyarakat. Berikut adalah penjelasan klasifikasi dalam subfungsi pendidikan:

- 1) Obat dan Peralatan Kesehatan, mencakup penyediaan obat-obatan, peralatan medis, alat terapi medis, dan prostesis, serta meliputi kegiatan administrasi, operasional, dan perbaikan alat terapi medis. Kegiatan ini tidak termasuk penyewaan peralatan terapi medis.
- 2) Pelayanan Kesehatan Perorangan, mencakup penyediaan layanan medis umum dan khusus, pelayanan gigi, paramedis, serta prostesis, termasuk layanan di rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak, serta kebidanan. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyewaan peralatan terapi medis dan layanan spesialis, seperti ortodensi dan pemeriksaan gigi.

- 3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat, mencakup penyediaan layanan kesehatan masyarakat secara umum, termasuk kegiatan operasional, administrasi, dan penyebaran informasi terkait kesehatan publik. Juga layanan bagi kelompok khusus, seperti rehabilitasi, namun tidak termasuk laboratorium medis atau institusi khusus lainnya.
- 4) Keluarga Berencana, mencakup aspek perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan pengelolaan dana keluarga berencana, termasuk standardisasi, penyusunan dan penyebaran informasi, serta dokumentasi dan statistik terkait program tersebut.
- 5) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mencakup kegiatan penelitian terapan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, termasuk perguruan tinggi swasta, serta mencakup pemberian hibah dan insentif. Kegiatan ini tidak mencakup penelitian dasar maupun pengembangan IPTEK.
- 6) Kesehatan Lainnya, mencakup kegiatan administrasi, operasional, dan dukungan terhadap kebijakan, perencanaan, serta standardisasi kesehatan yang tidak diklasifikasikan dalam subfungsi sebelumnya, termasuk penyusunan informasi, dokumen, dan statistik kesehatan lainnya.

Pemerintah menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu komponen strategis dalam pembangunan nasional karena kesehatan merupakan prasyarat utama bagi produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Perbaikan mutu layanan kesehatan tidak hanya membantu menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kapasitas kerja dan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat memiliki kapasitas lebih besar untuk bekerja secara optimal, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong aktivitas dan pertumbuhan perekonomian.

Sejalan dengan studi Mandey et al., (2022) bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan investasi penting dalam sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave & Musgrave (1989) bahwa pengeluaran publik di sektor sosial, seperti

kesehatan, merupakan instrumen penting dalam mencapai distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Dengan demikian, investasi di sektor kesehatan dapat menjadi motor pembangunan ekonomi jangka panjang melalui penguatan modal manusia. Belanja kesehatan yang efektif dan tepat sasaran juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara efisien, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

2.1.6.3 Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, belanja pada fungsi ekonomi mencakup pengeluaran pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Belanja ini meliputi sektor perdagangan, pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan bahan bakar, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta sektor telekomunikasi dan informatika.

Menurut PMK Nomor 102/PMK.02/2018, belanja fungsi ekonomi dirinci ke dalam beberapa subfungsi yang mencerminkan bentuk nyata pelaksanaan anggaran di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Belanja tersebut terdiri atas sebelas subfungsi utama, yaitu: (1) Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); (2) Tenaga Kerja; (3) Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan; (4) Pengairan; (5) Bahan Bakar dan Energi; (6) Pertambangan; (7) Industri dan Konstruksi; (8) Transportasi; (9) Telekomunikasi dan Informatika; (10) Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; (11) Ekonomi lainnya.

Rincian belanja dari masing-masing subfungsi mencakup kegiatan administrasi, operasional, penyusunan kebijakan dan regulasi, penyebaran informasi dan data, serta pemberian hibah, insentif, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. Berikut adalah penjelasan klasifikasi dalam subfungsi ekonomi:

- 1) Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM, mencakup penyusunan dan penerapan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan usaha, koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM), termasuk

pengelolaan hak kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta, serta pemberian hibah atau insentif untuk mendukung program-program sektor tersebut.

- 2) Tenaga Kerja, mencakup kegiatan pengembangan kebijakan dan program ketenagakerjaan, termasuk dukungan terhadap lembaga mediasi dan pemberian hibah atau insentif dalam bidang ketenagakerjaan.
- 3) Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan, mencakup program penanaman bibit, pengelolaan data dan statistik, serta pemberian hibah atau insentif untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.
- 4) Pengairan, mencakup pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengairan, penyebaran informasi, serta insentif untuk mendukung kebijakan dan program pengairan.
- 5) Bahan Bakar dan Energi, mencakup pelaksanaan konservasi, eksplorasi, dan pengembangan energi (padat, minyak dan gas, nuklir, serta energi alternatif), serta pemberian hibah atau insentif yang berkaitan.
- 6) Pertambangan, mencakup konservasi, eksplorasi, pengembangan dan pengawasan tambang, pengeluaran izin, serta pengaturan keselamatan kerja. Tidak termasuk kegiatan industri pengolahan seperti penyulingan minyak, batu bara, dan nuklir (subfungsi bahan bakar dan energi).
- 7) Industri dan Konstruksi, mencakup konservasi, pengembangan, pengawasan keselamatan industri dan konstruksi, serta pemberian insentif. Tidak mencakup konstruksi perumahan, pengolahan batu bara, dan sejenisnya.
- 8) Transportasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengaturan yang berkaitan dengan transportasi darat, laut, kereta api, udara, serta moda transportasi lainnya. Subfungsi ini juga meliputi pembangunan fasilitas pendukung, penyebaran informasi dan data transportasi, serta pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kebijakan dan program di bidang transportasi. Kegiatan ini tidak termasuk pengaturan lalu lintas, penerangan jalan, maupun bantuan untuk perusahaan konstruksi transportasi.

- 9) Telekomunikasi dan Informatika, mencakup kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem telekomunikasi dan teknologi telematika, regulasi, serta pemberian hibah, pinjaman, atau insentif. Tidak termasuk kegiatan radio dan satelit navigasi untuk transportasi air maupun siaran radio dan televisi.
- 10) Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, mencakup kegiatan riset terapan dan pengembangan yang dilakukan di beragam sektor ekonomi, seperti sektor perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, energi, pertambangan, transportasi, industri, dan telekomunikasi. Termasuk pula pemberian hibah atau insentif untuk lembaga nonpemerintah, seperti institusi penelitian dan perguruan tinggi swasta. Namun tidak mencakup penelitian dasar maupun pengembangan IPTEK.
- 11) Ekonomi Lainnya, mencakup segala aktivitas ekonomi yang berada di luar kategori subfungsi lainnya, seperti aktivitas yang terkait dengan meteorologi, geofisika, multi proyek, serta kegiatan penyimpanan dan distribusi.

Belanja pemerintah pada fungsi ekonomi tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, melainkan juga difokuskan pada pemerataan serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan studi Safitri et al. (2021) dan Sary & Anggraini (2024) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah pada fungsi ekonomi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM, berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat langsung maupun jangka panjang, membuka lapangan kerja, dan mendorong perputaran ekonomi. Sementara itu, prinsip pemberdayaan dalam dukungan terhadap UMKM turut mendorong pemerataan ekonomi.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.7.1 Definisi Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, pengangguran didefinisikan sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak sedang bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau belum mulai bekerja meskipun telah diterima di suatu pekerjaan.

Menurut Sukirno (2015), pengangguran merupakan kondisi ketika individu yang tergolong dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Orang yang tidak bekerja namun tidak berupaya mencari pekerjaan tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Untuk mengukur masalah pengangguran di suatu wilayah, digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja.

Pengangguran merupakan masalah yang penting di Indonesia dengan konsekuensi yang luas. Pengangguran menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, berkontribusi pada kemiskinan dan penurunan kesejahteraan sosial (Sejati, 2020). Ketika hal tersebut terjadi, maka dapat menyebabkan tekanan psikologis dan perilaku kriminal karena individu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Sabiq & Apsari, 2021).

2.1.7.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Sukirno (2015) mengemukakan bahwa penggolongan jenis pengangguran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran dan (2) berdasarkan karakteristik penganggurannya.

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Suatu perekonomian sudah mencapai kesempatan kerja penuh apabila terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau friksional. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Dalam kondisi ini, penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tergolong sebagai penganggur dan digolongkan sebagai pengangguran normal atau friksional.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran ini terjadi ketika penurunan permintaan agregat mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan atau menutup usahanya.

Kondisi ini menyebabkan jumlah penganggur meningkat dan termasuk dalam kategori pengangguran siklikal.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Penurunan kinerja industri atau perusahaan, yang bisa disebabkan oleh munculnya produk baru yang lebih unggul, kemajuan teknologi, atau tingginya biaya produksi sehingga tidak mampu bersaing, dapat menurunkan tingkat produksi. Akibatnya, sebagian pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan dan menjadi penganggur.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini terjadi akibat penggantian tenaga manusia dengan mesin atau bahan kimia. Contohnya, penggunaan herbisida untuk membersihkan perkebunan, sawah, atau lahan pertanian menggantikan pekerjaan manusia, serta penerapan robot di pabrik yang menggantikan tenaga kerja manusia.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah merupakan kondisi di mana tenaga kerja tidak dapat bekerja secara optimal akibat berbagai faktor, seperti jenis kegiatan perusahaan, skala perusahaan, metode produksi yang digunakan, dan tingkat output yang dicapai. Contohnya, jika sebuah restoran memiliki jumlah pelayan yang melebihi kebutuhan, maka kelebihan pelayan tersebut termasuk dalam kategori pengangguran tersembunyi.

3) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah kondisi di mana tenaga kerja tidak bekerja karena pekerjaan mereka tergantung pada musim atau kondisi cuaca tertentu. Biasanya, hal ini terjadi pada pekerja di sektor pertanian dan perikanan. Mereka akan bekerja saat musim atau cuaca memungkinkan, tetapi akan menganggur ketika cuaca buruk sehingga pekerjaan tidak tersedia.

4) Setengah Menganggur

Setengah menganggur disebabkan oleh tingginya arus migrasi dari desa ke kota, terutama di negara berkembang. Tidak semua pendatang berhasil memperoleh pekerjaan, sehingga sebagian menjadi penganggur atau setengah menganggur. Kondisi setengah menganggur terjadi ketika seorang pekerja memiliki jam kerja yang sangat terbatas, misalnya hanya bekerja satu atau dua hari dalam seminggu.

2.1.7.3 Rumus Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Di mana:

Jumlah Pengangguran = penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan.

Jumlah Angkatan Kerja = penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan/atau sedang mencari pekerjaan, termasuk pengangguran terbuka.

2.1.8 Hubungan Antar Variabel

2.1.8.1 Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Belanja pemerintah fungsi pendidikan berperan dalam meningkatkan kapabilitas manusia, terutama melalui perluasan akses pendidikan. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan dapat mendorong harapan lama sekolah yang merupakan salah satu indikator IPEI, serta mencerminkan kemampuan sistem pendidikan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan, sumber daya manusia menjadi lebih terampil dan kompeten, sehingga memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, belanja pendidikan berkontribusi terhadap aspek inklusi dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan penelitian oleh Arrfah & Syafri (2022) dan Safitri et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif karena berperan dalam pembentukan modal manusia dan pemerataan akses terhadap pendidikan.

2.1.8.2 Hubungan Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Belanja pemerintah pada sektor kesehatan juga memiliki peran penting dalam peningkatan kapabilitas manusia, khususnya melalui indikator IPEI seperti persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Kedua indikator ini menunjukkan perluasan akses terhadap layanan kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Penduduk yang sehat memiliki kapasitas kerja yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi lebih besar dalam aktivitas ekonomi, sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif.

Penelitian oleh Arrfah & Syafri (2022) dan Safitri et al., (2021) mengungkapkan bahwa belanja pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

2.1.8.3 Hubungan Pemerintah Fungsi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Belanja fungsi ekonomi diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran ini digunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan akses pembiayaan, terutama bagi UMKM dan kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, belanja ekonomi berkontribusi langsung pada beberapa sub pilar dalam IPEI, seperti pertumbuhan PDRB riil per kapita, peningkatan kesempatan kerja, dan keuangan yang inklusif. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dalam fungsi ini mampu memperkuat inklusi ekonomi dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

2.1.8.4 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan kemampuan pasar kerja dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif. TPT yang tinggi mencerminkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan serta tingkat kemiskinan, yang keduanya merupakan indikator penting dalam IPEI. Sebaliknya, penurunan TPT menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, TPT merupakan indikator kunci dalam mengukur sejauh mana hasil pembangunan ekonomi telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian Oktavia (2024) dan Safitri et al., (2021) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Saad (2024)	Unravelling the Belanja pemerintah pada sektor Public Spending- pendidikan, kesehatan, dan militer Inclusive Growth memiliki pengaruh positif dan Nexus: A PCA- signifikan terhadap pertumbuhan GMM Analysis in inklusif. Sebaliknya, tingkat Developing pengangguran memberikan pengaruh Economies negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Sementara itu, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan inklusif.	

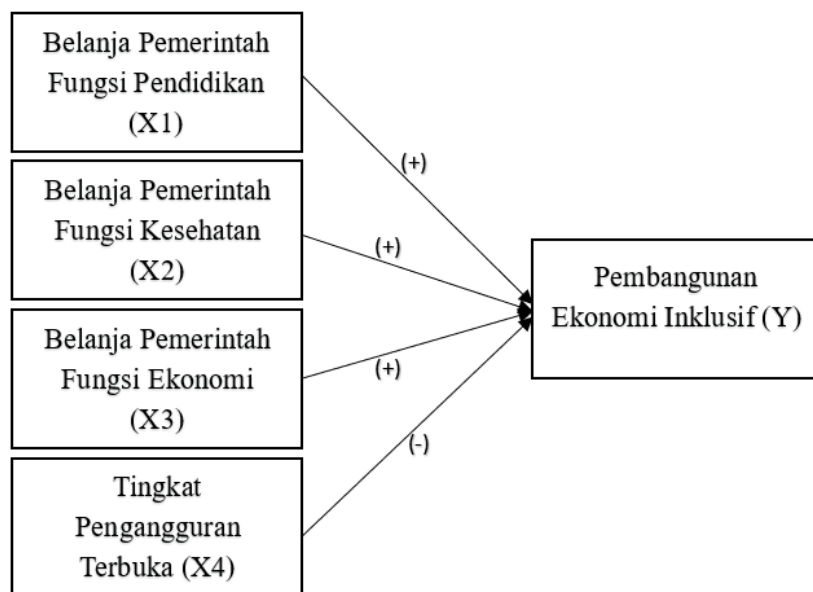
No.	Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
2.	Ekong et al., (2024)	Fiscal Policy and Inclusive Growth in Nigeria	Dalam jangka panjang, belanja pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan inklusif (HDI). Total pengeluaran pemerintah dan rasio total pajak terhadap PDB menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Sementara itu, ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan inklusif (HDI). Pada jangka pendek, rasio total pajak terhadap PDB dan belanja pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif (HDI). Sebaliknya, belanja untuk pendidikan, total pengeluaran pemerintah, dan ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif (HDI).
3.	Oktavia (2024)	Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Pulau Sumatera	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPEI. Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI. Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap IPEI.

No.	Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
			Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap IPEI
4.	Sary & Anggraini (2024)	The Effect of Government Spending on the Inclusive Economic Development Index on the Island of Sumatra	Belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPEI. Belanja fungsi pelayanan umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPEI. Belanja fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI.
5.	Arrfah & Syafri (2022)	Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah	Belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum dan belanja fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI. Belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPEI.
6.	Faizin & Prabowo (2022)	Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar 1 di Provinsi Jawa Tengah	Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPEI pilar 1. Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPEI pilar 1. Sementara pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPEI pilar 1. Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan

No.	Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
			secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPEI pilar 1.
7.	Safitri et al. (2021)	Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur	Dalam jangka panjang, belanja fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI. Sementara TPT berpengaruh negatif signifikan terhadap IPEI. Dalam jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI. Sementara, belanja ekonomi, PDRB per kapita, dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap IPEI.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap pembangunan ekonomi inklusif, namun umumnya belum mencakup seluruh variabel secara simultan sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, masih terbatas studi yang secara khusus memfokuskan pada wilayah Sumatera dengan periode analisis yang lebih terkini, yaitu tahun 2018–2023. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan regresi data panel. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang penting untuk merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah Sumatera.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Belanja pemerintah daerah memegang peran penting sebagai alat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Dengan pengalokasian anggaran berdasarkan fungsi seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pemerintah daerah dapat berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat sektor produktif. Belanja pemerintah pada fungsi pendidikan dan kesehatan turut mendukung pembangunan modal manusia dengan meningkatkan akses dan mutu layanan di bidang tersebut. Ketersediaan layanan dasar yang memadai memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, belanja pemerintah pada fungsi ekonomi mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri. Belanja pada fungsi ini tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi dan pasar. Ketiga jenis belanja tersebut secara bersama-sama memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, yakni pembangunan yang selain menekankan laju pertumbuhan ekonomi, juga memastikan distribusi manfaat merata, memperluas akses terhadap layanan dasar,

serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses dan hasil pembangunan.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh sisi pengeluaran pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap kesempatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan adanya hambatan dalam partisipasi ekonomi yang dapat menghambat pemerataan hasil pembangunan. Sebaliknya, rendahnya TPT dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan lebih merata dan inklusif karena semakin banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta tingkat pengangguran terbuka memiliki peran yang saling terkait dalam mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh keempat variabel tersebut terhadap pembangunan ekonomi inklusif di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2023.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Diduga belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.

H₂: Diduga belanja pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.

H₃: Diduga belanja pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.

H₄: Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018–2023.

H₅: Diduga belanja pemerintah fungsi pendidikan, belanja pemerintah fungsi kesehatan, belanja pemerintah fungsi ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2018–2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena data yang disajikan berbentuk angka. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini diterapkan pada populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, menganalisis data secara numerik/statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap pembangunan ekonomi inklusif di provinsi-provinsi Pulau Sumatera.

3.1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup batasan masalah yang akan diteliti agar fokus penelitian terjaga dan terhindar dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh variabel bebas, yaitu belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka, terhadap variabel terikat yaitu pembangunan ekonomi inklusif. Lokasi yang akan diteliti adalah 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, dengan periode penelitian tahun 2018–2023.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk keperluan penelitian

sebelumnya. Berikut daftar variabel dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data

Variabel	Indikator	Simbol	Satuan	Periode	Sumber
Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	IPEI	Indeks	Tahunan	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan	Persentase Belanja Pemerintah pada Fungsi Pendidikan terhadap Total Belanja Pemerintah	BP	Persen	Tahunan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan	Persentase Belanja Pemerintah pada Fungsi Kesehatan terhadap Total Belanja Pemerintah	BK	Persen	Tahunan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi	Persentase Belanja Pemerintah pada Fungsi Ekonomi terhadap Total Belanja Pemerintah	BE	Persen	Tahunan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja	TPT	Persen	Tahunan	Badan Pusat Statistik

Sumber: Penulis, 2025.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang mampu menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara

berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antarwilayah. Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi inklusif diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai dan memantau sejauh mana pembangunan ekonomi di Indonesia bersifat inklusif, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bappenas menetapkan nilai IPEI pada rentang 0–10. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bappenas dalam satuan indeks dan periode tahunan.

3.3.2 Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan

Belanja pemerintah fungsi pendidikan merupakan belanja yang diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di berbagai bidang berdasarkan akhlak mulia, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK dalam satuan persen dan periode tahunan.

Rumus persentase belanja pemerintah fungsi pendidikan:

$$= \frac{\textit{Total Belanja Fungsi Pendidikan}}{\textit{Total Belanja Pemerintah}} \times 100\%$$

3.3.3 Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan

Belanja pemerintah fungsi kesehatan merupakan belanja pemerintah pusat yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK dalam satuan persen dan periode tahunan.

Rumus persentase belanja pemerintah fungsi kesehatan:

$$= \frac{\textit{Total Belanja Fungsi Kesehatan}}{\textit{Total Belanja Pemerintah}} \times 100\%$$

3.3.4 Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi

Belanja pemerintah fungsi ekonomi merupakan belanja pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli

masyarakat. Belanja ini meliputi sektor perdagangan, pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan bahan bakar, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta sektor telekomunikasi dan informatika. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK dalam satuan persen dan periode tahunan.

Rumus persentase belanja pemerintah fungsi ekonomi:

$$= \frac{\text{Total Belanja Fungsi Ekonomi}}{\text{Total Belanja Pemerintah}} \times 100\%$$

3.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah orang yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS dalam satuan persen dan periode tahunan.

Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

3.4 Model dan Metode Analisis Data

3.4.1 Model Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data panel, yang merupakan kombinasi antara data lintas wilayah (*cross-section*) dan data deret waktu (*time-series*).

Model persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PEI = \beta_0 + \beta_1 BP_{it} + \beta_2 BK_{it} + \beta_3 BE_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

PEI	= Pembangunan Ekonomi Inklusif
BP	= Belanja Pemerintah fungsi Pendidikan
BK	= Belanja Pemerintah fungsi Kesehatan
BE	= Belanja Pemerintah fungsi Ekonomi
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
β_0	= Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
i	= Banyaknya objek
t	= Banyaknya tahun/waktu
ϵ	= Galat error

3.4.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah prosedur yang digunakan untuk mengolah variabel-variabel penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat bermanfaat dan menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu pengolahan data yang menggabungkan data deret waktu (*time series*) dan data lintas wilayah (*cross section*) secara bersamaan (*pooling*). Dengan menggunakan data panel, lebih banyak data yang tersedia, sehingga akan menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar (Sugianto et al., 2022). Menurut Sugianto et al., (2022) metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan baik secara statistik maupun teori ekonomi, diantaranya:

1. Mampu memperhitungkan heterogenitas individu.
2. Mampu mengontrol heterogenitas
3. Mampu mengurangi masalah *omitted-variables* (variabel yang dihilangkan) pada variabel yang substansial.
4. Mampu diterapkan untuk penyesuaian dalam studi yang bersifat dinamis (seperti mobilitas tenaga kerja), karena menggunakan observasi *cross-section* secara berulang.
5. Mampu memberikan estimasi yang lebih tepat dan efisien karena meningkatnya jumlah observasi.
6. Mampu dikembangkan untuk analisis data panel dari model sebelumnya, sehingga data satu individu dari waktu tertentu dianalisis untuk beberapa individu.

3.4.2.1 Uji Pemilihan Model

Dalam regresi data panel, terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi, yaitu:

a. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan bentuk regresi data panel yang paling sederhana karena menggabungkan data deret waktu (time series) dan lintas wilayah (cross section) tanpa mempertimbangkan perbedaan antar periode maupun antar individu. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku data serupa di setiap periode. Estimasi pada model ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) atau teknik kuadrat terkecil (Sugianto et al., 2022).

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

FEM adalah model yang mengakui bahwa ada perbedaan antar entitas yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam model ini, intercept dapat berbeda untuk setiap entitas, tetapi slope dianggap sama. FEM menekankan pada pengaruh tetap dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengontrol variabel yang tidak terobservasi yang mungkin mempengaruhi hasil. Dalam FEM, intercept bervariasi antar individu tetapi tidak bervariasi sepanjang waktu. FEM menghilangkan efek dari variabel tetap yang tidak terobservasi dan cocok untuk analisis di mana variasi antar individu penting. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variabel* (LSDV) (Sugianto et al. 2022)

c. *Random Effect Model* (REM)

Sugianto et al. (2022) model ini lebih sesuai untuk menganalisis data dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Model ini mengestimasi data panel di mana gangguan (*error*) dapat saling berkaitan baik antar waktu maupun antar individu. Pada model REM, variasi intersep antar unit ditangani melalui error term masing-masing entitas. Salah satu keunggulan model REM adalah kemampuannya mengurangi masalah heteroskedastisitas. Model ini juga dikenal dengan istilah *Error Component Model* (ECM) atau menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS).

Untuk pemilihan model yang tepat, maka dilakukan beberapa uji sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menetapkan model regresi data panel yang paling tepat, apakah CEM atau FEM. Ketentuan uji ini adalah:

- a. Jika nilai probability dari *Cross-section* F dan *Cross section* Chi-square $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah CEM.
- b. Jika nilai probability dari *Cross-section* F dan *Cross-section* Chi-square $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah FEM.

2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk menetapkan model regresi data panel yang paling tepat, apakah FEM atau REM. Ketentuan uji ini adalah:

- a. Jika nilai probability dari *Cross-section* random $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima model regresi yang dipilih adalah REM.
- b. Jika nilai probability dari *Cross-section* random $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak model regresi yang dipilih adalah FEM.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier menetapkan model regresi data panel yang paling tepat, apakah REM atau CEM. Ketentuan uji ini adalah:

- a. Jika nilai *cross section* Breusch-pagan $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah CEM.
- b. Jika nilai *cross section* Breusch-pagan $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah REM.

3.4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugianto et al. (2022), dalam penelitian sering ditemukan beberapa masalah pada model, seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Oleh karena itu, diperlukan uji asumsi klasik untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Pelaksanaan uji asumsi klasik bertujuan agar model regresi tidak bias dan parameter yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), meskipun tidak semua model memenuhi seluruh kriteria uji asumsi klasik.

Berikut penjabaran masing-masing uji asumsi klasik:

A. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal. Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas adalah menggunakan Jarque-Bera test. Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika nilai prob. $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya data terdistribusi normal.
- b. Jika nilai prob. $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya data tidak terdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat kolinieritas di antara variable independen dalam model. Ketika tingkat kolinearitas antarvariabel sangat tinggi, estimasi yang dihasilkan cenderung tidak merefleksikan kondisi sebenarnya. Untuk menilai ada atau tidaknya masalah tersebut dapat digunakan Uji Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria:

- a. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF ≥ 10 , maka mengindikasikan adanya multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian terhadap residual yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual bersifat homogen atau heterogen. Dalam penelitian yang menggunakan metode OLS sebagai teknik estimasi, residual diharapkan bersifat homogen. Kriteria untuk menilai hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probability $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probability $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada masalah heteroskedastisitas.

D. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual pada satu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Autokorelasi menandakan bahwa residual regresi tidak independen antar pengamatan. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan *Durbin-Watson test*. Kriteria penilaian hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < d_L$, maka terdapat autokorelasi positif.
2. Jika $d_L < d < d_U$, tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi.
3. Jika $d_U < d < 4 - d_U$, tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.
4. Jika $4 - d_U < d < 4 - d_L$, tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi.
5. Jika $4 - d_L < d < 4$, terdapat autokorelasi negatif.

3.4.1.3. Uji Hipotesis

Sugiyono (2013) mendefinisikan hipotesis sebagai dugaan sementara yang diajukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengujian hipotesis bertujuan mengevaluasi kebenaran pernyataan tersebut secara statistik, sehingga dapat diputuskan apakah pernyataan itu layak diterima atau harus ditolak. Uji hipotesis bertujuan untuk memberikan dasar yang memungkinkan pengumpulan bukti berupa data guna mengambil keputusan apakah suatu pernyataan atau asumsi yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis yang digunakan antara lain:

A. Uji t (Pengaruh secara parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dalam penelitian. Ketentuan pengujiannya adalah:

- a. Jika $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, hipotesis uji-t adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X_1)

H_0 : $\beta_1 = 0$, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

H_1 : $\beta_1 > 0$, Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

2. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (X_2)

H_0 : $\beta_2 = 0$, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

H_1 : $\beta_2 > 0$, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

3. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi (X_3)

H_0 : $\beta_3 = 0$, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

H_1 : $\beta_3 > 0$, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_4)

H_0 : $\beta_4 = 0$, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

H_1 : $\beta_4 < 0$, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

B. Uji F (Pengaruh secara simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama – sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $F \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya minimal satu variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

- b. Jika nilai probabilitas $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam penelitian ini, hipotesis uji-f adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, maka Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

H_a : Minimal satu $\beta \neq 0$, maka Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Sumatera.

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Widarjono (2018) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Koefisien ini juga menunjukkan seberapa baik garis regresi yang terbentuk. Nilai R^2 yang ideal adalah 1, yang berarti seluruh perubahan pada variabel dependen dapat sepenuhnya diterangkan oleh variabel independen yang digunakan dalam model. Dengan rentang $0 \leq R^2 \leq 1$, interpretasinya adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh variasi pada variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan, Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di 10 provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2018–2023, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.
2. Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.
3. Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018-2023.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah di wilayah Sumatera perlu mengevaluasi struktur alokasi anggaran pendidikan dengan mengurangi dominasi belanja pegawai dan meningkatkan proporsi belanja modal serta program-program strategis. Fokus belanja sebaiknya diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, pemerataan sarana-prasarana pendidikan, dan pemberian beasiswa untuk kelompok miskin, agar belanja pendidikan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.

2. Pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan peningkatan anggaran sektor kesehatan, khususnya pada pelayanan dasar yang menysasar kelompok miskin dan daerah tertinggal. Efektivitas belanja harus ditingkatkan melalui program-program pencegahan dan edukasi kesehatan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pengobatan ketika sakit, memperluas jangkauan pelayanan di wilayah perbatasan dan pedalaman, serta memperbaiki kualitas layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah perlu mempertahankan dan memperkuat alokasi anggaran pada fungsi ekonomi, khususnya untuk program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor riil, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM. Agar dampaknya lebih inklusif, pelaksanaan program harus diarahkan secara tepat sasaran kepada kelompok miskin, rentan, dan wilayah tertinggal melalui pendekatan berbasis pemberdayaan.
4. Pemerintah daerah perlu menjadikan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai prioritas utama dalam upaya pembangunan ekonomi yang inklusif. Strategi penciptaan lapangan kerja harus diarahkan tidak hanya untuk memperbanyak jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan pekerjaan yang tercipta bersifat layak, produktif, dan dapat diakses oleh kelompok miskin, rentan, serta pencari kerja muda. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, penyediaan fasilitas pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan dukungan kewirausahaan.
5. Penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi kunci agar belanja pemerintah lebih berdampak terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, memperbaiki sistem pengawasan, serta melibatkan publik secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
6. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan perluasan wilayah studi ke seluruh Indonesia guna melihat variasi dampak antarwilayah. Penelitian juga dapat menambahkan variabel kontekstual seperti kualitas pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, atau efektivitas program sosial yang

relevan. Kajian mendalam terhadap hubungan antarvariabel seperti interaksi antara pendidikan dan pengangguran juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaneme, E. N., & Aworinde, O. (2025). Effect of Government Education Expenditure on Inclusive Growth in Nigeria: The Role of Institutions. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(1), 147–161. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i11640>
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications* (Issue 97). www.adb.org/economics
- Ananta, P., Kamal, M. E. bin M., & Mohamed, N. (2023). Public Spending, Corruption, and Human Development: Empirical Evidence in Middle-Income Countries. *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023)*, 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey, 131, 561–579. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.48>
- Andi, F. (2024). Peran Pendidikan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Oku Timur. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(1), 13–24. <http://journal.unuha.ac.id/index.php/utility>
- Arkum, D., & Amar, H. (2022). The Influence of Economic Growth, Human Development, Poverty and Unemployment on Income Distribution Inequality: Study in the Province of the Bangka Belitung Islands in 2005-2019. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 413–422. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.413-422>
- Arrfah, A. P., & Syafri. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Info Artha*, 6(2), 159–166.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2025). *Isu strategis pengembangan wilayah Sumatera–Jawa–Bali*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses pada 23 September 2025, dari <https://bpiw.pu.go.id/artikel/isu-strategis-pengembangan-wilayah-sumatera-jawa-bali>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*.
- Bappenas. (n.d.). *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Diakses pada 27 Juni 2025, dari <https://inklusif.bappenas.go.id/indeks/>
- Becker, G. S. (1993). *HUMAN CAPITAL A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education THIRD EDITION*. The University of Chicago Press.
- Bono, Z. B. (2020). The Impact of Government Expenditure and Financial Inclusion on Inclusive Growth in Ethiopia. In *International Journal of Research in Business Studies and Management* (Vol. 7, Issue 3).
- Edison, & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(2).
- Ekong, C. N., Orebiyi, P. A., & Iriabije, A. O. (2024). Fiscal policy and inclusive growth in Nigeria. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(3), 1715–1732. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.3.1849>
- Faizin, M. A., & Prabowo, P. S. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Pilar 1 di Provinsi Jawa Tengah. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 2(2), 69–78.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. (2009). *Inclusive Growth Analytics Framework and Application*. <http://econ.worldbank.org>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Keunggulan Pulau Jawa*. Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Koridor Wilayah Jawa. Diakses pada 23 September 2025, dari <http://appejawa.navperencanaan.com/whypromotion/viewjawa>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.
- Klasen, S. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals Measuring and

- Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals ADB Sustainable Development Working Paper Series. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 12. www.adb.org/poverty
- Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics Of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22, 3–42.
- Mandey, A. W., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah atas Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2).
- Mangkoesebroto, Guritno. (2016). *Ekonomi Pubilk*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice* (5th ed.).
- Oktavia, A. N. (2024). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 08(02), 152–163.
- Patel, G., & Annapoorna, M. S. (2019). Public Education Expenditure and Its Impact on Human Resource Development in India: An Empirical Analysis. *South Asian Journal of Human Resources Management*, 6(1), 97–109. <https://doi.org/10.1177/2322093718813407>
- Purnomoratih, Y., & Ramadhani, S. N. (2023). Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Pembangunan SDM Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(2), 106–123. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.413>
- Purwanti, S. D., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. 4(1).

- Putri, A. S., & Anggraini, S. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang*, 7(2).
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik* (M. Fadhil Ridwan, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5).
- Rukmana, A. D., Aprilliani, A., Susilawati, I., Hilmahera, L., Safitri, M. A., Hayyi, N. A. M., & Jufrin. (2023). Analisis Dampak Kesehatan Masyarakat Terhadap Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus NTB. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 2(3). <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie>
- Saad, S. S. (2024). Unravelling the Public Spending-Inclusive Growth Nexus: A PCA-GMM Analysis in Developing Economies. *ERU Research Journal*, 0, 1–17. <https://doi.org/10.21608/erurj.2024.265595.1113>
- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96.
- Salman, & Ikbali, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68–72. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.99>
- Sary, T. A. N., & Anggraini, E. D. (2024). The Effect of Government Spending on the Inclusive Economic Development Index on the Island of Sumatra. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 3(4), 391–406. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v3i4.12146>

- Sejati, D. P. (2020). Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi. In *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* (Vol. 2, Issue 3).
- Sen, A. K. (1999). *Development As Freedom*.
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Isfa, F., & Muzayyana. (2025). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3424>
- Sugianto, E. K., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan EViews* (M. Surur, Ed.; 1st ed.). Academia Publication.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi: Teori dan Pengantar* (ed. 3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulya, S. K., Rindiani, Masitoh, G., Oktaviani, C. D., & Rezola, A. R. (2025). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 100–123. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2171>
- UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 2024. (2024).
- UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2009).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.